

## Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan, Rasio Efektivitas, Dan Rasio Efisiensi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jalur Pantura Jawa Timur

Khoirun Nisa<sup>1\*</sup>, Oryza Tannar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

\*E-mail: 22013010277@student.upnjatim.ac.id

### Information Article

*History Article*

*Submission: 01-06-2026*

*Revision: 10-06-2026*

*Published: 11-07-2026*

### DOI Article:

10.62421/jibema.v4i1.532

### ABSTRAK

Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Jalur Pantura Provinsi Jawa Timur periode 2021-2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik sampel jenuh dengan jumlah 50 data observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan model *Random Effect Model* (REM) berbantuan EViews 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rasio efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan kualitas alokasi anggaran yang berorientasi pada pelayanan publik dan pembangunan manusia.

**Kata Kunci:** Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Kesejahteraan Masyarakat, Indeks Pembangunan Manusia

### ABSTRACT

*Through regional autonomy policies, local governments are given the authority to manage financial resources according to the characteristics and needs of each region. This study aims to analyze the effect of the degree of fiscal decentralization, the dependency ratio, the effectiveness ratio of Regional Original Revenue (PAD), and the regional financial efficiency ratio on community welfare, as proxied by the Human Development Index (HDI), in regencies/cities along the Pantura route in East Java Province for the period 2021-2025. This study uses a quantitative approach with a saturated sampling technique with 50 observational data. The data analysis technique uses panel data regression analysis with the Random Effect Model (REM) assisted by EViews 13. The results show that the degree of fiscal decentralization and the dependency ratio have a positive and significant effect on community welfare. Meanwhile, the effectiveness*

### Acknowledgment

*ratio of Regional Original Revenue (PAD) and the regional financial efficiency ratio do not significantly affect community welfare. Therefore, local governments need to optimize regional financial management by improving the quality of budget allocations oriented towards public services and human development.*

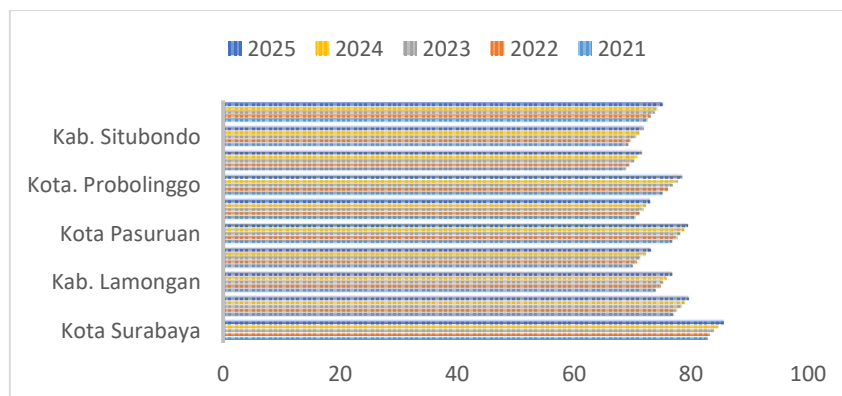
**Keywords:** *Degree of Fiscal Decentralization, Dependency Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Community Welfare, Human Development Index*

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

## PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah. Kewenangan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pembangunan daerah, serta mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Budiardjo, 2019; Todaro & Smith, 2020).

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan maupun pencapaian target anggaran, tetapi juga berdasarkan sejauh mana pengelolaan tersebut mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah daerah yang tercermin melalui rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio efisiensi keuangan daerah menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan publik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2018).



**Gambar 1** Skor IPM Kabupaten dan Kota di Jalur Pantura Jawa Timur 2021-2025

Sumber: data diolah (2026)

Kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini diproksikan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menggambarkan capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (Todaro & Smith, 2020). Meskipun IPM di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren meningkat selama periode 2021–2025, peningkatan tersebut belum diikuti oleh pemerataan kualitas pembangunan antardaerah. Perbedaan capaian IPM masih terlihat pada kabupaten dan kota di sepanjang Jalur Pantura Jawa Timur, yang merupakan kawasan strategis dengan aktivitas industri, perdagangan, transportasi, dan logistik yang tinggi.

Sebagai salah satu koridor ekonomi utama di Pulau Jawa, Jalur Pantura Jawa Timur memiliki peran penting dalam mendukung distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, tingginya aktivitas ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kota Surabaya secara konsisten memiliki capaian IPM tertinggi, sedangkan beberapa daerah lain seperti Kabupaten Situbondo masih menunjukkan capaian yang relatif lebih rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingginya aktivitas ekonomi belum tentu diikuti oleh pengelolaan fiskal daerah yang mampu menghasilkan pembangunan manusia secara optimal (Malisan et al., 2023; Syaban et al., 2023).

Berdasarkan Teori Federalisme Fiskal, pelimpahan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah memungkinkan penyediaan pelayanan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih baik diharapkan mampu mengalokasikan anggaran secara lebih efektif sehingga mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia. Sebaliknya, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dapat memengaruhi fleksibilitas pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan (Oates, 1972).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Hendri & Yafiza, (2020), Handayani et al., (2023), Trisna, (2025), serta Susilo et al., (2026) menemukan bahwa desentralisasi fiskal dan beberapa indikator kinerja keuangan daerah memiliki hubungan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Namun, hasil penelitian mengenai rasio efektivitas dan rasio efisiensi masih menunjukkan inkonsistensi. Cahyaning & Putri, (2022), misalnya, menemukan bahwa rasio efisiensi tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kinerja keuangan daerah dan pembangunan manusia masih memerlukan kajian empiris lebih lanjut.

Selain adanya inkonsistensi hasil penelitian, sebagian besar penelitian terdahulu masih dilakukan pada tingkat provinsi atau wilayah lain di Indonesia, seperti Kalimantan Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun kawasan timur Indonesia. Penelitian yang secara khusus mengkaji kabupaten dan kota di Jalur Pantura Jawa Timur masih sangat terbatas, padahal kawasan ini memiliki karakteristik ekonomi, fiskal, dan pembangunan yang berbeda dibandingkan wilayah lainnya. Dengan demikian,

masih terdapat kesenjangan empiris mengenai bagaimana indikator kinerja keuangan daerah memengaruhi kesejahteraan masyarakat pada kawasan strategis tersebut.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis pengaruh empat indikator utama kinerja keuangan daerah, yaitu derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat pada sepuluh kabupaten/kota di Jalur Pantura Jawa Timur selama periode 2021–2025. Fokus penelitian pada kawasan strategis nasional ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris baru mengenai hubungan antara kapasitas fiskal daerah dan pembangunan manusia yang belum banyak dibahas pada penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat yang diprosikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten dan kota di Jalur Pantura Jawa Timur periode 2021–2025. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian akuntansi sektor publik serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas-eksplanatori yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kausal antara variabel independen berupa indikator pengelolaan keuangan daerah terhadap variabel dependen berupa kesejahteraan masyarakat. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di sepanjang Jalur Pantura Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan kriteria spasial dan administratif yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023, diperoleh sampel sebanyak 10 kabupaten/kota yang dilewati langsung oleh Jaringan Jalan Arteri Primer, yaitu: Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Situbondo. Dengan periode pengamatan selama lima tahun (2021–2025), total unit observasi (data panel) yang dianalisis berjumlah 50 unit data.

Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) audited yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dan DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Definisi operasional beserta rumus pengukuran masing-masing variabel dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

### 1. Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Diprosikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur capaian pembangunan

manusia berbasis tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak (Todaro & Smith, 2020). Variabel ini dinyatakan dalam bentuk skor indeks berskala 0–100.

## 2. Derajat Desentralisasi Fiskal (X1)

Mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan daerah secara mandiri (Mardiasmo, 2018). Rasio ini diformulasikan sebagai:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

## 3. Rasio Ketergantungan (X2)

Mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi guna mendanai aktivitas operasional dan pelayanan publiknya (Saragih, 2022). Rasio ini dirumuskan sebagai:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

## 4. Rasio Efektivitas (X3)

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Mardiasmo, 2018). Formulasi rasio ini adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

## 5. Rasio Efisiensi (X4)

Mengukur perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan yang berhasil dicapai (Saputra & Haryadi, 2022). Rasio efisiensi ini diformulasikan sebagai:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

## Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel (*pooled data*) yang menggabungkan data deret waktu (*time series*) dan data lintang bujur (*cross-section*). Pengolahan dan pengujian statistik dilakukan dengan bantuan perangkat lunak EViews 13.

Tahapan penentuan model estimasi terbaik dilakukan melalui tiga uji formal, yaitu (1) Uji Chow untuk memilih antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM); (2) Uji Hausman untuk memilih antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM); dan (3) Uji Lagrange Multiplier (LM) jika diperlukan untuk memilih antara CEM atau REM. Berdasarkan hasil pengujian formal pada skripsi ini, model terbaik yang terpilih untuk mengestimasi parameter adalah *Random Effect Model* (REM).

Selanjutnya, uji asumsi klasik yang relevan untuk model REM (seperti uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas) dilakukan guna memastikan bahwa model estimasi memenuhi sifat Blue (Best Linear Unbiased Estimator). Pengujian hipotesis dilakukan melalui Uji t (parsial) pada tingkat signifikansi = 5% untuk mengetahui pengaruh masing-masing rasio keuangan secara mandiri, Uji F (simultan) untuk melihat pengaruh model secara keseluruhan, serta analisis koefisien determinasi R<sup>2</sup> untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variasi dari variabel kesejahteraan masyarakat di Jalur Pantura Jawa Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

**Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

Variabel	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std.Dev.
IPM (Y)	75,0982	74,5650	85,6500	68,9400	4,3254
Derajat Desentralisasi Fiskal (X1)	0,2484	0,2081	0,6876	0,1115	0,1389
Rasio Ketergantungan (X2)	0,7395	0,7840	0,8842	0,3124	0,1378
Rasio Efektivitas (X3)	1,0002	0,9977	1,2927	0,6732	0,1208
Rasio Efisiensi (X4)	1,0161	1,0089	1,1497	0,9041	

Sumber: *Output EViews 13*, data diolah (2026)

### Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Untuk menentukan model terbaik di antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan *Random Effect Model* (REM), dilakukan serangkaian pengujian formal. Pertama, Uji Chow menghasilkan nilai Prob. Cross-section F sebesar 0,0000 (kurang dari 0,05), yang menunjukkan FEM lebih baik daripada CEM. Kedua, Uji Hausman menghasilkan nilai Prob. Cross-section Random sebesar 0,4329 (lebih besar dari 0,05), yang mengindikasikan bahwa REM lebih tepat daripada FEM. Ketiga, Uji Lagrange Multiplier (LM) memperkuat temuan ini dengan nilai probabilitas Breusch-Pagan sebesar 0,0000 (kurang dari 0,05), yang menegaskan REM mengungguli CEM. Berdasarkan rangkaian pengujian tersebut, *Random Effect Model* (REM) ditetapkan sebagai model estimasi terbaik dalam penelitian ini.

### Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menjamin validitas model REM. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser) menunjukkan nilai probabilitas seluruh variabel independen berada di atas 0,05 ( $X_1 = 0,1703$ ;  $X_2 = 0,0761$ ;  $X_3 = 0,3439$ ;  $X_4 = 0,4038$ ), sehingga model dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, hasil Uji Autokorelasi menggunakan nilai statistik Durbin-Watson (DW) menghasilkan angka sebesar 1,3311. Nilai tersebut berada pada rentang aman (1 hingga 3), yang berarti residual model tidak mengalami masalah autokorelasi yang serius.

**Analisis Regresi Data Panel dan Uji Hipotesis**

**Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Variabel	Koefisien	t-Statistic	Probabilitas	Keterangan
Derajat Desentralisasi Fiskal (X1)	54,52678	8,344082	0,0000	Signifikan
Rasio Ketergantungan (X2)	33,98494	4,653793	0,0000	Signifikan
Rasio Efektivitas PAD (X3)	-1,15337	-1,111485	0,2723	Tidak Signifikan
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X4)	-2,47320	-1,365575	0,1789	Tidak Signifikan

Sumber: *Output EViews 13*, data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 2, persamaan estimasi regresi data panel dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = 40,08854 + 54,52678X_{1it} + 33,98494X_{2it} - 1,15337X_{3it} - 2,47320X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Secara simultan (Uji F), model regresi menghasilkan nilai F-statistic sebesar 29,25705 dengan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000000 (kurang dari 0,05). Hasil ini membuktikan bahwa derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi keuangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,697583 menunjukkan bahwa variasi dari variabel IPM mampu dijelaskan oleh keempat variabel independen di dalam model sebesar 69,76%, sedangkan sisanya sebesar 30,24% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat ( $\beta = 54,527$ ;  $p = 0,000$ ). Diterimanya H1 ini mengindikasikan bahwa peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperluas ruang fiskal pemerintah kabupaten/kota di Jalur Pantura Jawa Timur untuk membiayai sektor pelayanan dasar secara mandiri. Fenomena ini linier dengan Fiscal Federalism Theory (Musgrave, 1959; Oates, 1972) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki keunggulan informasi atas preferensi publik, sehingga diskresi fiskal yang lebih tinggi mendorong efisiensi alokasi anggaran demi optimalisasi komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara empiris, kapasitas fiskal Kota Surabaya yang tinggi terbukti berkorelasi dengan capaian IPM yang superior dibandingkan wilayah Pantura lainnya. Temuan ini memperkuat studi Hendri & Yafiza, (2020), Handayani et al., (2023), Trisna, (2025), serta Susilo et al., (2026) yang menegaskan bahwa kemandirian fiskal merupakan

katalisator utama peningkatan kualitas hidup dan percepatan konvergensi IPM antarwilayah.

### **Pengaruh Rasio Ketergantungan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Rasio ketergantungan keuangan daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat ( $\beta = 33,985$ ;  $p = 0,000$ ), sehingga H2 diterima. Meskipun rata-rata rasio ketergantungan kabupaten/kota di Jalur Pantura tergolong sangat tinggi (73,95%), pasokan dana transfer dari pemerintah pusat (DAU, DAK, dan DBH) justru menjadi stimulan krusial dalam mendanai pembangunan makro di koridor strategis nasional ini. Hasil ini merefleksikan berjalannya fungsi distribusi dalam Fiscal Federalism Theory (Musgrave, 1959), di mana redistribusi sumber daya oleh pemerintah pusat efektif memitigasi celah fiskal daerah dan menjamin pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selama dana transfer dikelola secara tepat sasaran untuk infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan, dependensi fiskal tidak menjadi hambatan bagi kemajuan sosial. Temuan ini sejalan dengan argumen Syahrini et al., (2025) serta Agrawal et al., (2024), namun menyelisik pandangan teoretis konvensional dari Kuncoro, (2022) serta Halim & Kusufi, (2021) yang cenderung melihat ketergantungan fiskal sebagai pelemah ruang gerak otonomi daerah.

### **Pengaruh Rasio Efektivitas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat ( $\beta = -1,153$ ;  $p = 0,272$ ), yang berarti H3 ditolak. Secara deskriptif, kinerja pemungutan PAD kabupaten/kota di Jalur Pantura masuk kategori sangat efektif dengan rata-rata realisasi mencapai 100,02%. Namun, tingginya angka capaian ini belum berkontribusi pada IPM karena rasio efektivitas hanya mencerminkan ketepatan target administratif, bukan besaran absolut pendapatan atau kualitas pemanfaatannya. Sesuai fungsi alokasi dalam Teori Federalisme Fiskal, penyerapan anggaran yang tidak berorientasi pada outcome pelayanan publik—atau cenderung terserap pada belanja operasional birokrasi—membuat efisiensi pendapatan kehilangan daya ungkit sosialnya. Pola ini konsisten dengan studi Handayani et al., (2023), Winarni et al., (2022), serta Trisna, (2025) yang menekankan bahwa keberhasilan realisasi target fiskal menuntut prasyarat berupa tata kelola belanja produktif agar mampu memicu peningkatan standar hidup masyarakat secara riil.

### **Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Rasio efisiensi keuangan daerah didapati tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat ( $\beta = -2,473$ ;  $p = 0,178$ ), sehingga H4 ditolak. Temuan bahwa rata-rata rasio efisiensi berada di angka 101,61% (kategori tidak efisien) mengindikasikan realisasi belanja daerah yang sedikit melampaui pendapatan demi mengakomodasi kebutuhan pembangunan jangka panjang. Dalam kerangka Fiscal Federalism Theory, ukuran efisiensi input-output keuangan yang kaku tidak serta-merta

mencerminkan keberhasilan fungsi alokasi barang publik. Mengingat sebagian besar belanja daerah masih didominasi pengeluaran rutin birokrasi dan dampak investasi pembangunan manusia bersifat time-lag (padat modal dengan hasil jangka panjang), penghematan anggaran semata tidak mampu mengubah potret IPM dalam jangka pendek. Hasil penelitian ini memperkuat analisis empiris dari Handayani et al., (2023), Winarni et al., (2022), serta Trisna, (2025) yang menyimpulkan bahwa orientasi kebijakan fiskal daerah tidak boleh terjebak pada pemangkasan belanja demi predikat efisiensi, melainkan harus berfokus pada kualitas pengalokasian yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial.

## SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Jalur Pantura Jawa Timur ditentukan oleh optimalisasi kapasitas fiskal daerah dan dukungan dana transfer pusat, bukan sekadar pemenuhan target administratif keuangan. Secara parsial, derajat desentralisasi fiskal terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menjawab pertanyaan penelitian bahwa kemandirian daerah dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu memperluas ruang fiskal untuk mendanai pelayanan dasar secara mandiri. Senada dengan hal tersebut, rasio ketergantungan keuangan juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Temuan ini menegaskan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi instrumen redistribusi yang sangat vital dalam menopang pembangunan makro dan infrastruktur logistik di koridor ekonomi Pantura. Sebaliknya, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil ini mengonfirmasi bahwa keberhasilan mencapai target pendapatan yang baru sebatas pemenuhan administratif, serta pengetatan anggaran yang terlalu kaku (over-efficiency), justru kontraproduktif dan tidak mampu mendongkrak kualitas pembangunan manusia dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, D. R., Brueckner, J. K., & Brühlhart, M. (2024). *Fiscal Federalism in the Twenty-First Century*. 429–454.
- Budiardjo, M. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (2019th ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyaning, E. K., & Putri, F. K. (2022). Pengaruh Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(4), 257–263. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i4.85>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Handayani, L., Seniorita, Anantadjaya, S. P. D., Hendrawan, H., & Tannady, H. (2023). Analysis of the Influence of Fiscal Decentralization, Dependency Ratio, and Ratio of Independence on the Human Development Index in East Region of Indonesia. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(1), 140–147. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i1.914>

- Hendri, Z., & Yafiza, M. (2020). PENGARUH RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 56–66.
- Kuncoro, M. (2022). *Manajemen Keuangan Daerah dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah*.
- Malisan, J., Marpaung, E., Hutapea, G., Puriningsih, F. S., & Arianto, D. (2023). Development of short sea shipping in the north coast of Java Island, Indonesia as a potential market. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 18, 100760. <https://doi.org/10.1016/j.trip.2023.100760>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). Andi.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Saputra, A., & Haryadi, B. (2022). Pengaruh Ketergantungan Fiskal terhadap Pembangunan Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(2), 112–126.
- Saragih, J. (2022). Local Government Capital Expenditure, Internal Supervision, Wealth and Human Development: Evidence from Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 89–106. <https://doi.org/10.24815/jdab.v9i1.23562>
- Susilo, Prasetyia, F., Wicesa, N. A., & Finuliyah, F. (2026). Forum for Social Economics The Impact of Fiscal Decentralization on Human Development Index Convergence in Indonesia: An Arellano-Bond GMM Dynamic Panel Data Estimation The Impact of Fiscal Decentralization on Human Development Index Convergence in Indon. *Forum for Social Economics*, 0(0), 1–29. <https://doi.org/10.1080/07360932.2025.2610937>
- Syaban, A., Fitriani, N., & Ahmad, R. (2023). Implementation of multimodal transportation in logistics on Java Island. *Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik*, 4(2), 121–130. [https://www.researchgate.net/publication/376402738\\_Implementation\\_of\\_Multimodal\\_Transportation\\_in\\_Logistics\\_on\\_Java\\_Island](https://www.researchgate.net/publication/376402738_Implementation_of_Multimodal_Transportation_in_Logistics_on_Java_Island)
- Syahrimi, Ariodillah, H., & Anna, Y. (2025). Fiscal decentralization, monetary policy, and economic growth in Indonesia: A panel data analysis. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 13(4), 375–397. <https://doi.org/10.22437/ppd.v13i4.42111>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson.
- Trisna, M. (2025). Fiscal Decentralization, Financial Performance, and Human Development: Evidence from Central Kalimantan. *JIAKES Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(6), 1911–1920. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4527>
- Winarni, E., Handayani, R., & Soleh, A. (2022). Analisis hubungan kinerja keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(1), 270–276. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.369>